



LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja tahun 2020 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sebagai salah satu Instansi Pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai media informasi, pertanggungjawaban kinerja serta sebagai alat pengendali menuju terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan program pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Laporan kinerja tahun 2020 ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon pada tahun 2020. Perjanjian kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2020-2024 dan perwujudan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran.

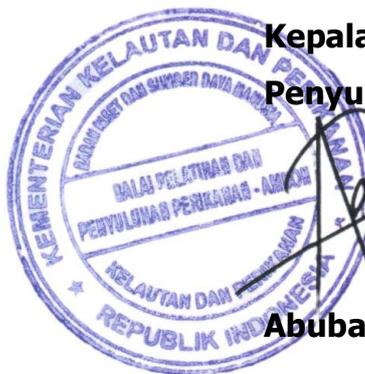
Selama tahun 2020, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang terdiri dari 4 sasaran



strategis dan 15 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam laporan kinerja ini dijabarkan mengenai target dan realisasi kinerja pada tahun 2020, keberhasilan/kegagalan program, permasalahan dan solusi serta kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Akhir kata, semoga penyajian Laporan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dan sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi selama tahun 2020 dan umpan balik untuk terus meningkatkan kinerja kedepan secara produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan dan koordinasi pelaksanaannya.

**Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon**



Abubakar



TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab:

Abubakar S.St.Pi, M.Si

Ketua:

Rahmawati Umasugi S.Pi, M.Si

Sekretaris :

Moh. Arief Hidayat A.Md

Anggota:

Fiona A.B. Nikyuluw S.Pi, M.Si

Wahyu Retno Aris S.St.Pi

Dessy Rompis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN	iii
DAFTAR ISI	iv
IKTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	4
1.3 Tugas dan Fungsi BPPP Ambon	5
1.4 Keragaan SDM BPPP Ambon.....	7
1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis	11
2.2 Rencana Kerja Tahun 2020	19
2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2020	20
2.4 Pengukuran Kinerja.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Prestasi Kinerja.....	25
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	26
3.3 Akuntabilitas Keuangan	43
BAB IV PENUTUP	45
4.1 Akuntabilitas Keuangan.....	45
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	47
LAMPIRAN	



IKTISAR EKSEKUTIF

Sasaran kinerja yang dicapai pada tahun 2020 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon yaitu administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan kerjasama, informasi dan dokumentasi ilmiah yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkup Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon telah menetapkan 4 (Empat) Sasaran Strategis yang akan dicapai pada Tahun 2020. Dari 4 (Empat) Sasaran Strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 15 (Lima belas) indikator kinerja, yang selanjutnya ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan merupakan target kinerja Balai yang harus diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2020.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan keempat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke 4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ketujuh pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional. Visi tersebut selaras dengan salah satu sasaran pokok RPJPN 2005-2025, yaitu "Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional". RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/* MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Perkembangan IPTEK yang pesat di era revolusi industri 4.0 dan era sosial (*society*) 5.0 menuntut adanya perubahan tatanan kehidupan baru yang berpusat



pada manusia (*human-centered*) serta berbasis teknologi (*technology based*). *Cyber-physical system* (CPS) dalam Industri 4.0 merupakan integrasi antara *physical system*, komputasi dan juga *network/komunikasi*, sedangkan *society 5.0* merupakan penyempurnaan dari CPS menjadi *cyber-physical-human systems*. Pada era *society 5.0* manusia tidak hanya dijadikan obyek (*passive element*), tetapi berperan aktif sebagai subyek (*active player*) yang bekerja bersama *physical system* dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut, interaksi antara mesin (*physical system*) dan manusia diperlukan untuk menjaga keseimbangan maupun keharmonisan

Hal utama yang harus dicermati adalah bahwa keberhasilan pembangunan perikanan sangat tergantung pada perubahan perilaku pelaku utama dalam menyikapi tantangan tersebut. Selain peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas, penyuluhan perikanan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan perikanan, karena mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan proses alih informasi dan teknologi (*transfer knowledge*) bagi pelaku utama beserta keluarganya serta anggota masyarakat lainnya. Terlebih lagi, pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Y Sub Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dimana penyelenggaraan penyuluhan perikanan menjadi kewenangan pusat, sehingga BRSDM melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan sebagai unit satuan kerja harus mampu memainkan peran strategisnya agar penyelenggaraan penyuluhan perikanan dapat berjalan efektif, efisien dan kompeten.

Keberadaan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi dan misi KKP melalui:

1. Peningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan secara optimal melalui pelatihan dan sertifikasi;
2. Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar dan peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya



kelautan dan perikanan;

3. Membantu dalam meningkatkan ekonomi para pelaku usaha melalui penumbuhan dan pembentukan usaha mikro, kecil dan koperasi sektor kelautan dan perikanan; serta
4. Meningkatkan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan secara efektif dan efisien dan tepat sasaran melalui diseminasi dan pelatihan.

Untuk memastikan keseluruhan program dan kegiatan pembangunan KP tersebut dapat terlaksana sesuai dengan rencana target waktu, kuantitas, kualitas dan sasarannya, telah disepakati perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Menteri dengan Eselon I dan diturunkan secara berjenjang sampai tingkat individu pegawai, dan telah ditetapkan sampai tingkat daerah (satuan kerja).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Salah satu prinsip dalam tata cara kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran. Penyelenggaraan kegiatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan Negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.



Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon pada tahun 2020 melaksanakan program kerja dan anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PUSLATLUH KP. Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-program jangka panjang dan menengah KKP khususnya program pelatihan dan penyuluhan KP sebagaimana tertuang dalam Renstra PUSLATLUH KP tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Tahun 2020 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomer 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP dan kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang disertai dengan pemberdayaan sumberdaya dalam pencapaian visi organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, lingkup penyusunan laporan kinerja ini adalah memberikan gambaran kondisi objektif atau profil Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2020, perencanaan strategis, target dan capaian kinerja serta evaluasi capaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama dan/atau Penetapan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

1.2 Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja (LKj) BPPP Ambon Tahun 2020 memenuhi beberapa tujuan, yaitu:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala PUSLATLUH KP selaku Pemberi Mandat atas pencapaian Kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2020.
2. Sebagai umpan balik dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.



1.3 Tugas dan fungsi BPPP Ambon

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/PERMEN- KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pelatihan dan penyuluhan yang ada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPP Ambon dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan;
- b. penyusunan program dan anggaran, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan;
- c. pelatihan teknis dan manajerial di bidang perikanan;
- d. penyusunan materi, metodologi, dan pelaksanaan penyuluhan perikanan;
- e. pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial di bidang perikanan;
- f. pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan;
- g. pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), swadaya, dan swasta; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

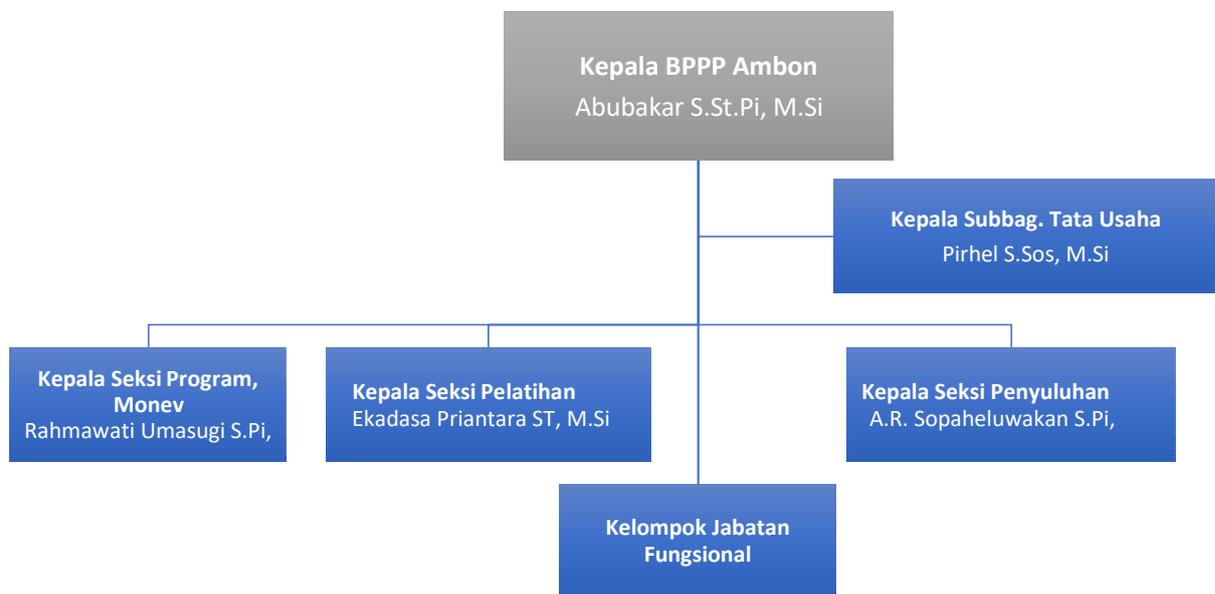
Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, BPPP Ambon membentuk Struktur Organisasi dan didukung dengan kemampuan sumberdaya manusia perikanan dan sarana prasarana atau fasilitas yang tersedia. Masing-masing bagian mempunyai tugas pokok dan uraian tugas tersendiri. Sub Bagian Tata Usaha dengan tugasnya melakukan adminstrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga serta pelaporan. Seksi Program dengan tugasnya melakukan penyiapan bahan penyusunan program anggaran pelatihan dan penyuluhan serta monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan. Seksi Pelatihan dengan tugas melakukan persiapan kegiatan pelatihan. Seksi Penyuluhan dengan tugas



melakukan kegiatan koordinasi dan melakukan administrasi dengan penyuluh wilayah kerja. Sedangkan kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan kegiatan pelatihan serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/KEPMEN- KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, Struktur Organisasi di BPPP Ambon dapat dilihat pada Gambar 1

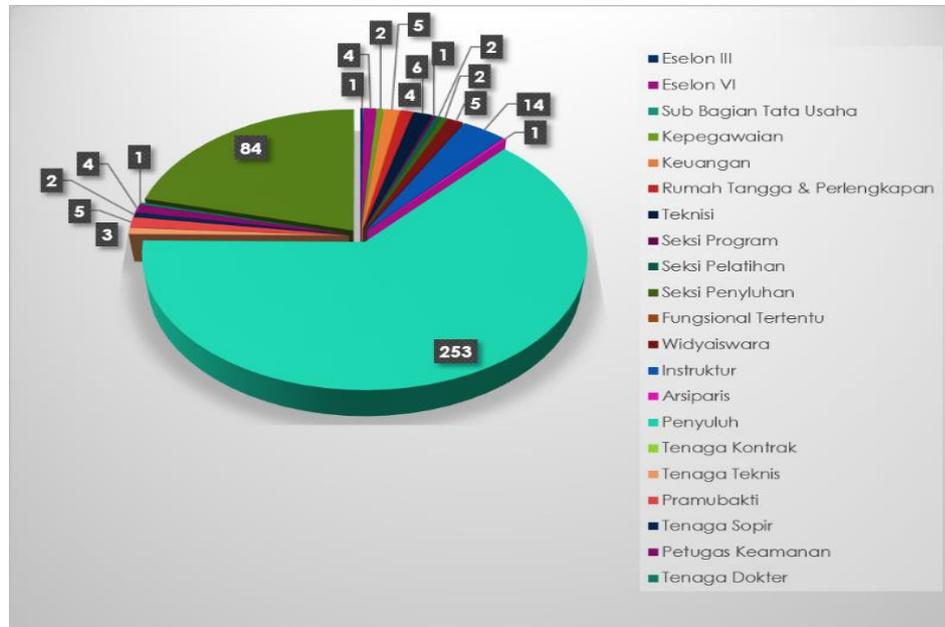


Gambar 1. Struktur Organisasi BPPP Ambon



1.4 Keragaan SDM BPPP Ambon

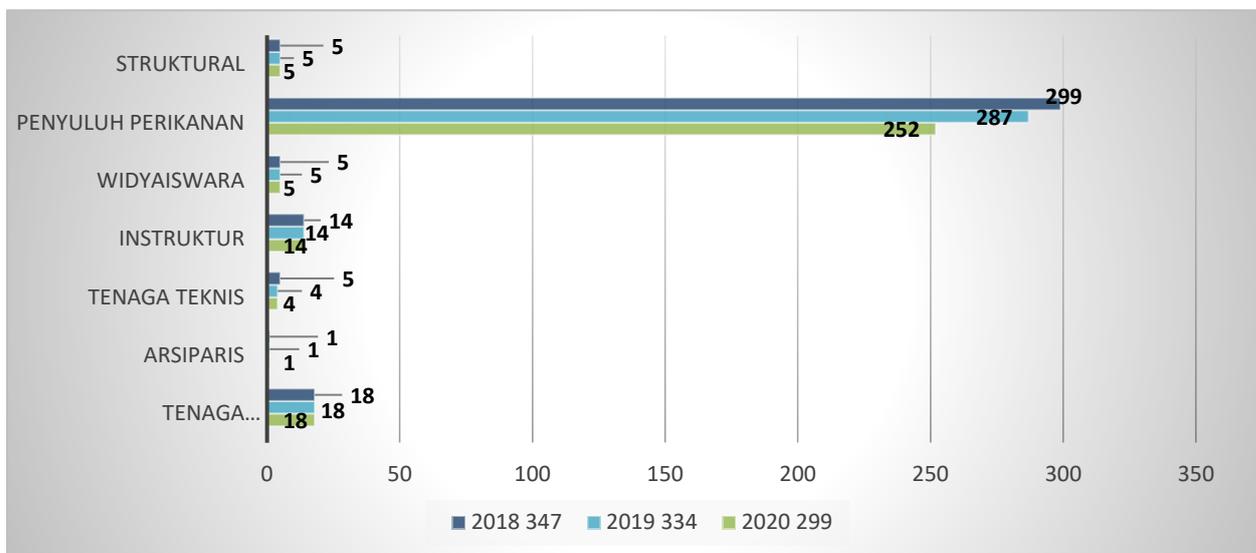
Jumlah pegawai negeri sipil di BPPP Ambon per 18 Desember 2020 sebanyak 299 orang dengan rincian komposisi pegawai sebagai berikut :



Gambar 2. Komposisi Pegawai BPPP Ambon



Komposisi pegawai BPPP Ambon per tanggal 17 Desember tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3 Komposisi pegawai BPPP Ambon tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya

1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja (LKj) BPPP Ambon Tahun 2020 :

- 1) Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 2) PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) PP Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.



Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara lebih rinci, muatan dokumen LKj ini tergambar dalam sistematika laporan yang tersusun sebagai berikut :

a. Ikhtisar Eksekutif, menyajikan ringkasan isi laporan kinerja;

b. Bab I – Pendahuluan,

Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

c. Bab II – Perencanaan Kinerja,

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020.

d. Bab III –Akuntabilitas Kinerja, Capaian Kinerja Organisasi

Menguraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

e. Bab IV – Penutup,

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

f. Lampiran,

Perjanjian kinerja,

Lampiran yang dianggap perlu.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan memberikan arah bagi pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ini dituangkan dalam perencanaan strategis periode lima tahunan. Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kegiatan yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis baik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun maupun 5 (lima) tahunan. Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam dokumen perencanaan kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon memuat rencana pelaksanaan program dan kegiatan termasuk dukungan pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan. Rencana kerja juga memuat target dan indikator sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Rencana strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2020-2024 berisi langkah-langkah strategis yang akan memberi arah bagi penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan penyuluhan dalam rangka menunjang visi Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan.

Sesuai dengan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dan untuk mencapai visi yang tertuang dalam RENSTRA, maka BPPP Ambon telah menetapkan Visi, Misi, Tugas dan Fungsi yaitu :



2.1.1 Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan menggunakan visi Presiden.

Visi BRSDM pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Visi Puslatluh KP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP dan visi BRSDM yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Sejalan dengan Pusat pelatihan dan Penyuluhan KP, visi BPPP Ambon pada tahun 2020-2024 adalah menggunakan Visi BRSDM, yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

2.1.2 Misi

Untuk dapat berkontribusi dalam pencapaian visi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka BPPP Ambon menerapkan misi yang sama dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menjalankan misi Presiden, KKP dan BRSDM dalam bidang kelautan dan perikanan sebagai berikut:

- 1) Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas SDM KP melalui Peningkatan kompetensi dan pendampingan dalam penerapan hasil inovasi riset Kelautan dan Perikanan;
- 2) Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui pelatihan dan penyuluhan KP guna mendukung peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian



Nasional;

- 3) Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui pelatihan dan penyuluhan KP guna mendukung Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang lestari;
- 4) Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

2.1.3 Tujuan

Tujuan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi KKP yang ingin dicapai selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
- 2) Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan.
- 3) Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
- 4) Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.4 Sasaran Strategis

Renstra BPPP Ambon tahun 2020 – 2024 menjelaskan bahwa sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program pelatihan dan penyuluhan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh



BPPP Ambon sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan, dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yaitu *Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Process Perspective, dan Learning and Growth Perspective*.

- 1) Terlaksananya pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP.

Mewujudkan masyarakat perikanan yang sejahtera melalui pendampingan kelompok oleh penyuluh perikanan adalah tujuan yang ingin dicapai BPPP Ambon pada masa kerja 5 tahun mendatang. Keberhasilan pencapaian tujuan ini ditandai dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- a) Tersuluhnya kelompok pelaku utama/usaha sebanyak 14.137 kelompok selama 2020-2024;
 - b) Kelompok yang dinilai kelas kelompoknya sebanyak 319 kelompok selama 2020- 2024;
 - c) Calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan sebanyak 485 kelompok selama 2020-2024.
- 2) Pelatihan dan penyuluhan mendukung hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan dengan memanfaatkan teknologi hasil inovasi riset kelautan dan perikanan. Indikator yang ditargetkan adalah adanya desa mitra yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil riset dan inovasi BRSDM sebanyak 1 desa setiap tahun selama 2020-2024;

- 3) Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat.

Meningkatnya kompetensi SDM KP adalah tujuan utama pelatihan dan penyuluhan perikanan yang dilakukan oleh BPPP Ambon. Untuk mengetahui pencapaian tujuan itu, indikator yang digunakan selama 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :



- a) Persentase Lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri sebanyak 60%.
 - b) Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) sebanyak 76 orang.
 - c) SDM KP yang dilatih sebanyak 8.765 orang.
 - d) Masyarakat KP yang bersertifikat kompetensi sebanyak 1.300 orang.
 - e) Percontohan penyuluhan KP yang diterapkan sebanyak 27 unit.
 - f) Sarana dan prasarana Puslatluh yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 4 unit.
 - g) Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga diklat sebanyak 5 lembaga.
 - h) Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Sektor KP yang dibina di BPPP Ambon (unit) sebanyak 2.720 unit.
- 4) Tatakelola pemerintahan yang baik

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon ingin menjadi instansi yang memiliki kinerja yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Untuk itu, tujuan ini adalah mutlak untuk menyempurnakan kekurangan yang dimiliki dengan indicator keberhasilan sebagai berikut :

- a) Indeks Profesionalitas ASN lingkup PuslatluhKP sebesar 72.
- b) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup PuslatluhKP sebesar 82%.
- c) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRSDM adalah 88 atau baik.
- d) Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK 2019 dibandingkan realisasi anggaran TA. 2019 sebesar 1 %.
- e) Nilai Kinerja Anggaran Puslatluh KP sebesar minimal 8



2.1.5 Potensi dan Permasalahan

2.1.5.1 Potensi

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dibidang kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan kelautan dan perikanan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta riset kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon bertugas melaksanakan kegiatan Pelatihan Kelautan dan Perikanan pada wilayah kerjanya di 5 (lima) propinsi di Indonesia. Wilayah kerja BPPP Ambon yaitu propinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, dan Papua. Kegiatan Pelatihan ditujukan kepada masyarakat kelautan dan perikanan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha di sektor penangkapan, budidaya, pengolahan, pemasaran hasil perikanan, serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.



Gambar 4 Wilayah Kerja BPPP Ambon



BPPP Ambon juga membawahi Penyuluh Perikanan pada 4 (empat) Provinsi meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. BPPP Ambon bertugas menyiapkan bahan pengembangan penyuluhan dan pelaksanaan penyuluhan, serta penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta. Keberhasilan pencapaian target ditentukan oleh sumberdaya yang dimiliki oleh suatu organisasi. Berikut adalah potensi sumberdaya BPPP Ambon dalam mencapai tujuan organisasi :

- 1) BPPP Ambon berada pada posisi yang sangat strategis di Kota Ambon, tepatnya di Jl.Martha Alfons, Poka, Kecamatan Teluk Ambon. Sebelah selatan berbatasan dengan Pantai Teluk Ambon, sebelah Utara berbatasan dengan Universitas Pattimura, sebelah barat dicapai dengan jalur darat melalui Wayame dan Rumah Tiga, Sebelah Timur dicapai dengan kapal feri penyebarangan Galala-Poka
- 2) Memiliki workshop yang lengkap untuk setiap bidang pelatihan;
- 3) BPPP Ambon memiliki instalasi budidaya ikan air tawar yang strategis untuk pengembangan budidaya ikan air tawar;
- 4) Memiliki SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidangnya (5 orang widyaiswara, 14 orang instruktur, 4 orang tenaga teknis/pelatih, dan 252 orang penyuluh perikanan);
- 5) Sebagian besar SDM BPPP Ambon memiliki usia muda yang produktif;
- 6) BPPP Ambon tersertifikasi ISO 9001:2015;
- 7) Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan diklat sesuai manajemen mutu ;
- 8) Memiliki akreditasi dari Direktorat Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan untuk menyelenggarakan diklat *Basic Safety Training* (BST);



- 9) Adanya mandat dari Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan kepada BPPP Ambon sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK);
- 10) BPPP Ambon sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi 1 sehingga dapat menerbitkan sertifikat kompetensi sendiri;
- 11) SDM Asesor BPPP Ambon sebanyak 39 orang sehingga akan mampu melaksanakan uji kompetensi dengan jumlah peserta yang banyak;
- 12) BPPP Ambon mampu membuat sarana produksi perikanan tertentu;
- 13) BPPP Ambon mampu menghasilkan produk hasil perikanan yang layak dipasarkan;
- 14) BPPP Ambon mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kualitas garam rakyat;
- 15) BPPP Ambon mampu memproduksi garam beryodium dengan bahan baku yang berasal dari garam rakyat

2.1.5.2 Permasalahan

Sebagai Lembaga pelatihan dan penyuluhan yang terus berkembang menjadi pilihan utama stakeholder dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan, BPPP Ambon memiliki beberapa hal yang penting untuk diperbaiki antara lain :

Aspek penyelenggaraan pelatihan KP :

- 1) Ketersediaan tenaga pelatih (instruktur dan widyaiswara) yang terus berkurang dikarenakan beberapa sudah memasuki usia purnatugas dan mutasi;
- 2) Sarana dan prasarana pelatihan belum sesuai dengan standar minimal pelatihan yang ditetapkan dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini;
- 3) Kurikulum dan modul belum seluruhnya tersedia dan



terstandarisasi.

- 4) Kurangnya program pengembangan SDM pelatih.

Sedangkan aspek penyelenggaraan penyuluhan :

- 1) Kelembagaan penyuluhan perikanan belum berjalan dengan optimal;
- 2) Kualitas dan kuantitas penyebaran penyuluh perikanan masih belum memadai;
- 3) Kuantitas dan kualitas materi penyuluhan perikanan masih terbatas dalam aksesibilitasnya;
- 4) Sarpras penyuluhan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas penyuluh;
- 5) Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan masih terbatas;
- 6) Legislasi dan regulasi belum seluruhnya tersedia;
- 7) Batasan peran pemerintah daerah belum jelas, terutama terkait penyelenggaraan penyuluhan pasca UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

2.2 Rencana Kerja Tahun 2020

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pada Rencana Strategis, BPPP Ambon didukung dengan anggaran sebesar Rp 47.873.585.000 (setelah mengalami revisi pada bulan April 2020). Dukungan anggaran tersebut berupa kegiatan :

- a. Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih, anggaran Rp 1.242.585.000;
- b. Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapatkan pendampingan, anggaran Rp 4.871.872.000;
- c. Percontohan Penyuluhan KP yang diterapkan, anggaran Rp 86.000.000;
- d. Layanan dukungan manajemen satker, anggaran Rp 356.639.000;
- e. Layanan perkantoran, anggaran Rp 41.316.405.000.



2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2020

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN& RB Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja sendiri pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang diimplementasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah memiliki tujuan :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelesaikan manajemen kinerja secara baik,
- b. Untuk mengontrol serta mengevaluasi tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan kinerja didalam laporan kinerja ini sudah didasarkan pada analisis *Balance Score Card* (BSC). Penetapan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2020 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan pada Januari 2020. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020.

Sehubungan dengan mulai diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan KKP, maka dipandang perlu untuk melakukan pemantapan PK lingkup BRSDM KP tahun 2018. Pemantapan PK mengakibatkan terjadi perubahan PK 2020 UPT lingkup BRSDM KP.

Revisi Perjanjian Kinerja PK BPPP Ambon per bulan Juni 2020 antara lain sebagai berikut :

- 5.1. Pada SS 1 Terlaksananya pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat



- a. Perubahan target pada IK 1 Kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon dari 2.673 menjadi 2.518 kelompok.

5.2 Pada SS 2 Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat

- a. Perubahan redaksional IK 5 dari Lulusan Pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon target 1.659 orang menjadi IK 5 Persentase lulusan pelatihan yang bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon target 60%;
- b. Perubahan target IK 6 Lulusan pelatihan yang membentuk rintisan usaha baru di BPPP Ambon dengan target 15 orang menjadi 5 orang;
- c. Perubahan target IK 7 SDM KP yang dilatih di BPPP Ambon dengan target 2.765 menjadi 1165 orang;
- d. Perubahan target IK 8 Masyarakat KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Ambon dengan target awal 200 menjadi tidak ada;
- e. Perubahan target IK 9 Percontohan Penyuluhan yang diterapkan di Satminkal BPPP Ambon dengan target 4 menjadi 1 unit;

5.3 Pada SS 4 Tatakelola pemerintahan yang baik

- a. Penambahan IK 17 Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (nilai) dengan target 88.

Perjanjian Kinerja BPPP Ambon setelah mengalami revisi pada bulan Juni 2020 menjadi seperti pada tabel berikut :

Tabel 1. Penetapan Kinerja BPPP Ambon tahun 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	1	Kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon (kelompok)	2.518
		2	Kelompok yang dinilai kelas kelompoknya di Satminkal BPPP Ambon (kelompok)	39
		3	Calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan di Satminkal BPPP Ambon (kelompok)	97



NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	Pelatihan dan penyuluhan mendukung hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan	4	Desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP di BPPP Ambon (desa)	1
3	Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat	5	Persentase lulusan pelatihan yang bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)	60
		6	Lulusan pelatihan yang membentuk rintisan usaha baru di BPPP Ambon (orang)	5
		7	SDM KP yang dilatih di BPPP Ambon (orang)	1.165
		8	Percontohan penyuluhan KP yang diterapkan di Satminkal BPPP Ambon (unit)	1
		9	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga diklat di BPPP Ambon (lembaga)	1
		10	Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Sektor KP yang dibina di BPPP Ambon (unit)	544
4	Tatakelola pemerintahan yang baik	11	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPP Ambon (indeks)	72
		12	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Ambon (%)	82
		13	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (nilai)	Baik (88)
		14	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Ambon dibandingkan realisasi anggaran BPPP Ambon TA. 2019 (%)	1
		15	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	85



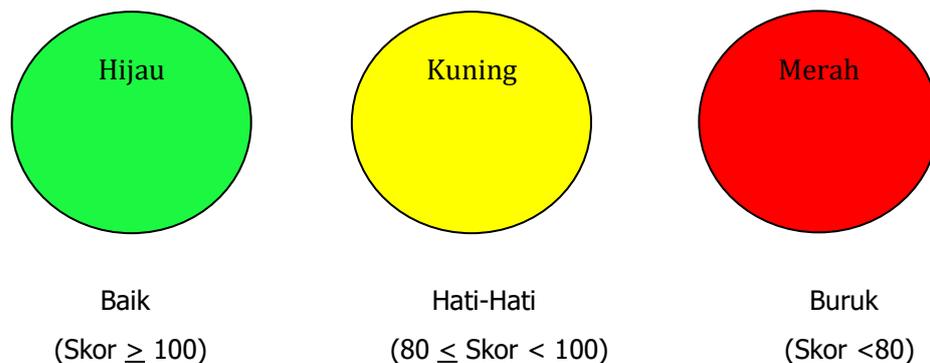
2.4 Pengukuran Kinerja

2.4.1 Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BPPP Ambon Tahun 2020, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah :

- Angka maksimum adalah 120;
- Angka minimum adalah 0;
- Formulasi penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;

Adapun status indeks capaian IKU seperti gambar 5 sebagai berikut :



Gambar 5. Status indeks capaian IKU

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen *Balanced Score Card* (BSC).



2.4.2 Metode Pengukuran Kinerja

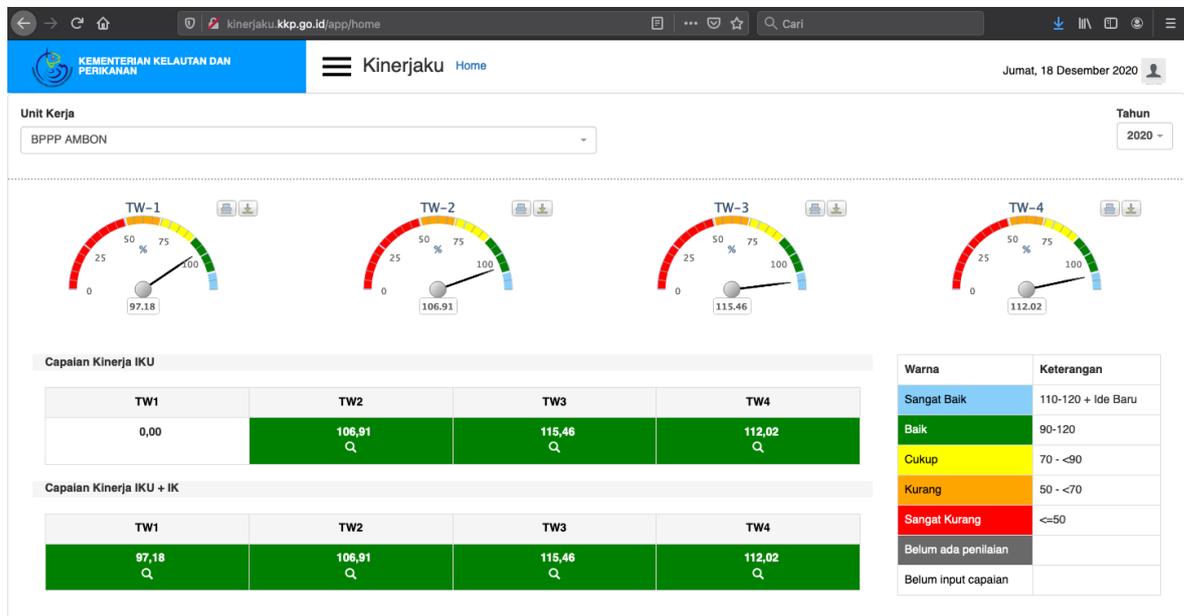
Metode pengukuran kinerja lingkup BPPP Ambon dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12), serta tahunan pada akhir tahun anggaran. Pengukuran ditugaskan kepada Tim Pengelola Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BPPP Ambon Nomor 21/BPPP/KP.110/I/2020 tentang Tim Pengelola Kinerja BPPP Ambon Tahun 2020. Keanggotaan tim terdiri dari pejabat dan staf yang mewakili semua seksi-seksi lingkup BPPP Ambon. Berdasarkan laporan seksi-seksi penanggung jawab kegiatan, Kepala Balai c.q. Bagian Program, Monitoring dan Evaluasi merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Prestasi Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BPPP Ambon Triwulan III tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPP Ambon di tingkat korporat triwulan IV tahun 2020 sebesar 112,02%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 6. Dashboard Kinerjaku Level 3 BPPP Ambon

Selama tahun 2020, dari 15 IKU BPPP Ambon, seluruh IKU telah berwarna hijau. Itu artinya seluruh target yang telah ditetapkan telah tercapai semua



3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BRSDM KP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi BPPP Ambon yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2020 dapat tercapai. BPPP Ambon pada tahun 2020 memiliki beberapa kegiatan prioritas dengan capaian kinerja atas kegiatan prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Capaian IKU tahun 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TW III	% REALISASI
1	Terlaksananya pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	1	Kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon (kelompok)	2.518	2.686	106,67
		2	Kelompok yang dinilai kelas kelompoknya di Satminkal BPPP Ambon (kelompok)	39	240	615,38
		3	Calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan di Satminkal BPPP Ambon (kelompok)	97	136	140,2
2	Pelatihan dan penyuluhan mendukung hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan	4	Desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP di BPPP Ambon (desa)	1	2	200



NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TW III	% REALISASI
3	Kapabilitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat	5	Persentase lulusan pelatihan yang bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)	60	61,63	102,72
		6	Lulusan pelatihan yang membentuk rintisan usaha baru di BPPP Ambon (orang)	5	5	100
		7	SDM KP yang dilatih di BPPP Ambon (orang)	1.165	1.165	100
		8	Percontohan penyuluhan KP yang diterapkan di Satminkal BPPP Ambon (unit)	1	1	100
		9	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga diklat di BPPP Ambon (lembaga)	1	1	100
		10	Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Sektor KP yang dibina di BPPP Ambon (unit)	544	548	100,74
4	Tatakelola pemerintahan yang baik	11	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPP Ambon (indeks)	72	76,28	105,94
		12	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Ambon (%)	82	82	100
		13	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (nilai)	Baik (88)	92,83	105,49
		14	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Ambon dibandingkan realisasi anggaran BPPP Ambon TA. 2019 (%)	1	0	100
		15	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	85	92,03	108,27



Salah satu misi BRSDMKP dalam mendukung visi Kementerian adalah peningkatan kualitas SDM KP melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan dalam penerapan hasil inovasi riset Kelautan dan Perikanan. Dengan fokus kesejahteraan masyarakat dengan didukung oleh pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan maka sasaran strategis tersebut menjadi tujuan utama pencapaian Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon dengan didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja utama atas sasaran strategis tersebut. BPPP Ambon sebagai bagian dari pembangunan kelautan dan perikanan melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsi atas pencapaian sasaran strategis tersebut dengan dukungan alokasi anggaran pada setiap IKU sasaran strategis tersebut melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan dengan sentuhan kegiatan penyuluhan KP.

1. Sasaran Strategis 1 (SS1) : Terlaksananya pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP

Untuk mencapai sasaran strategis Terlaksananya pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP terdapat 3 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 1 : Kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon (kelompok), IKU 2 : Kelompok yang dinilai kelas kelompoknya di Satminkal BPPP Ambon (kelompok) dan IKU 3 : Calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan di Satminkal BPPP Ambon (kelompok).

- a) IKU 1 : Kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon (kelompok)

Merupakan indikator yang menggambarkan jumlah kelompok SDM yang disuluh mendukung terwujudnya kedaulatan dan keberlanjutan



melalui penyelenggaraan penyuluhan. Penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan Kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang disuluh.

IKU ini merupakan IKU penyuluhan yang sudah ada sejak tahun 2018 pada saat penyuluh perikanan di daerah bergabung dengan pusat sehingga terbentuk Satuan Administrasi Pangkal di BPPP Ambon pada tahun 2017, akan tetapi pola perhitungannya adalah perhitungan secara individu atau perorangan dengan realisasi pada tahun 2018 sebanyak 25.358 orang dan pada tahun 2019 sebanyak 34.500 orang. IKU ini merupakan turunan dari IKU Seksi Penyuluhan, sampai akhir Tahun 2020 Penyuluh Satminkal BPPP Ambon sudah melakukan penyuluhan sebanyak 2.686 kelompok dari target kelompok yang disuluh sebanyak 2.518 kelompok. Pada tahun 2020 target IKU ini sudah dapat dicapai dikarenakan para penyuluh Satminkal BPPP Ambon telah memiliki perjanjian kinerja masing-masing dengan Kepala BPPP Ambon dan kepatuhan Penyuluh dalam merealisasikan target PK tersebut dengan cara melakukan penyuluhan kepada kelompok pelaku utama perikanan secara kontinyu.



Gambar 7. Penyuluhan di Kab. Halmahera Tengah Prov. Maluku Utara



Gambar 8. Penyuluhan di Kab. Merauke Prov. Papua



b) IKU 2 : Kelompok yang dinilai kelas kelompoknya di Satminkal BPPP Ambon (kelompok)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang dinilai kelas kelompoknya sesuai Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.

IKU ini merupakan IKU penyuluhan yang sudah ada sejak tahun 2018 pada saat penyuluh perikanan di daerah bergabung dengan pusat sehingga terbentuk Satuan Administrasi Pangkal di BPPP Ambon pada tahun 2017, namun merupakan target antara Seksi Penyuluhan dengan penyuluh Satminkal dengan target sebanyak 70 % penyuluh yang melakukan penilaian kelas kelompok. Pada tahun 2019 nilai pencapaian IKU ini sudah mencapai 1.462 unit. IKU ini merupakan turunan dari IKU seksi Penyuluhan, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang dinilai kelas kelompoknya yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan. sampai akhir Tahun 2020, Penyuluh Satminkal BPPP ambon telah melakukan pendataan calon kelompok yang dinilai kelas kelompoknya sebanyak 240 kelompok dari target sebanyak 39 kelompok. Para penyuluh Satminkal BPPP Ambon juga telah dibekali juknis penilaian kelas kelompok sehingga penilaian kelas kelompok dapat dilakukan.



Gambar 9. Penilaian Kelas Kelompok Di Kabupaten Biak Numfor



Gambar 10. Penilaian Kelas Kelompok Di Kabupaten Biak Numfor



- c) IKU 3 : Calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan di Satminkal BPPP Ambon (kelompok)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah calon kelompok pelaku utama yang diusulkan menjadi kelompok Pelaku utama setelah mendapatkan penyuluhan, dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.

IKU ini merupakan turunan dari IKU seksi Penyuluhan, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah calon kelompok yang diusulkan menjadi kelompok Pelaku utama yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penumbuhan kelompok. sampai akhir Tahun 2020, Penyuluh Satminkal BPPP ambon sudah melakukan penumbuhan kelompok baru sebanyak 136 kelompok dari target kelompok yang ditumbuhkan sebanyak 97 kelompok. Para penyuluh Satminkal BPPP Ambon juga telah dibekali juknis penumbuhan kelompok sehingga penumbuhan kelompok dapat dilakukan.



Gambar 11. Penumbuhan Kelompok di Kab. Maluku Tengah



2. Sasaran Strategis 2 (SS2) : Pelatihan dan penyuluhan mendukung hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan.

Untuk mencapai Sasaran Strategis Pelatihan dan penyuluhan mendukung hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan terdapat 1 (satu) Indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 4 : Desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP di BPPP Ambon (desa).

a) IKU 4 : Desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP di BPPP Ambon (desa)

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6/2014).

Inovasi adalah cara-cara baru atau teknologi baru yang digunakan untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat agar berdaya guna dan berhasil guna. Teknologi merupakan materi konkret (*hard* atau *soft*) pengetahuan untuk penggunaan praktis, yang dapat mengubah pengalaman manusia dan dunia yang dihuninya. Desa mitra adalah desa komunitas kp yang memanfaatkan tehnologi dan inovasi kelautan dan perikanan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat kp.

IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2020. IKU ini merupakan turunan dari IKU seksi Penyuluhan, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah Desa yang memanfaatkan tehnologi dan inovasi kelautan dan perikanan tahun 2020 yang dibuktikan dengan MOU/PKS antara Kepala Badan RSDMKP dengan Bupati/Walikota. sampai akhir Tahun 2020, Penyuluh Satminkal BPPP ambon telah melakukan kerjasama dengan 2 desa yang menerapkan IPTEK KP sehingga nilai pencapaian pada Tahun 2020



sebanyak 2 Desa. Desa-desa tersebut juga mengetahui kinerja dari BPPP Ambon karena BPPP Ambon sudah banyak mengeluarkan inovasi yang sangat membantu masyarakat kelautan dan perikanan sehingga desa tersebut melakukan kontrak Kerjasama dengan BPPP Ambon.



Gambar 12. Desa Inovasi di Desa Rumah Tiga Kota Ambon

3. Sasaran Strategis 3 (SS3) : Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat

Untuk mencapai Sasaran Strategis Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat terdapat 8 Indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 5 : Lulusan pelatihan yang bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (orang), IKU 6 : Lulusan pelatihan yang membentuk rintisan usaha baru di BPPP Ambon (orang), IKU 7 : SDM KP yang dilatih di BPPP Ambon (orang), IKU 8 : Percontohan penyuluhan KP yang diterapkan di Satminkal BPPP Ambon (unit), IKU 9 : Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga diklat di BPPP Ambon (lembaga) dan IKU 10 : Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Sektor KP yang dibina di BPPP Ambon (unit).

- a) IKU 5 : Lulusan pelatihan yang bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)

Merupakan indikator yang menggambarkan Jumlah lulusan pelatihan yang menunjukkan Jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/usaha yang menerapkan hasil pelatihan di DUDI.



IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2020. IKU ini merupakan turunan dari IKU seksi Program, Monitoring dan Evaluasi, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah pelaku utama/pelaku usaha KP yang telah dilatih dan menerapkan hasil pelatihannya yang dihitung melalui evaluasi pasca pelatihan sekurang-kurangnya setelah 1 siklus produksi setelah dilatih. Sampai akhir Tahun 2020, BPPP ambon memiliki target sebesar 60% dan telah melakukan pendataan lulusan pelaku utama/usaha yang akan menerapkan hasil pelatihannya sebanyak 718 orang dari target sebanyak 1.165 orang melalui kegiatan evaluasi pasca pelatihan, sehingga nilai pencapaian pada Tahun 2020 adalah = $718 : 1.165 \times 100 = 61,63 \%$



Gambar 13. Kegiatan Evapasca di Kab. Seram Bagian Timur



Gambar 14. Kegiatan Evapasca di Kab. Seram Bagian Barat



Gambar 15. Kegiatan Evapasca di Kota Ambon



b) IKU 6 : Lulusan pelatihan yang membentuk rintisan usaha baru di BPPP Ambon (orang)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dengan memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya (pengembangan ekonomi digital) dan atau membuat jejaring pasar.

IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2020. IKU ini merupakan turunan dari IKU seksi Pelatihan, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah pelaku utama lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dan memanfaatkan teknologi digital dan atau jejaring pasar dalam pengembangan usahanya yang dihitung melalui evaluasi pasca pelatihan sekurang-kurangnya setelah 1 siklus periode setelah dilatih. Sampai akhir Tahun 2020, BPPP ambon telah melakukan pendataan pelaku utama lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dan memanfaatkan teknologi digital dan atau jejaring pasar dalam pengembangan usahanya sebanyak 5 orang dari target sebanyak 5 orang, sehingga nilai pencapaian pada Tahun 2020 sudah 100%. Pelaku utama tersebut memasarkan hasil prakteknya melalui media sosial masing-masing sehingga menarik banyak pembeli dan meningkatkan nilai pendapatan mereka.





Gambar 16. Salah satu peserta pelatihan budidaya yang menjadi start up

c) IKU 7 : SDM KP yang dilatih di BPPP Ambon (orang)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang telah dilatih dibidang kelautan dan perikanan.

Realisasi IKU pada tahun 2015 sampai dengan 2018 sebanyak 6.784 orang, dengan rincian sebagai berikut : Tahun 2015 sebanyak 2.992 orang, pada tahun 2016 sebanyak 840 orang, pada tahun 2017 sebanyak 840 orang, pada tahun 2018 sebanyak 1.712 orang dan pada tahun 2019 sebanyak 400 orang.

IKU ini merupakan turunan dari IKU seksi Pelatihan, Sampai akhir Tahun 2020 sudah dilakukan pelatihan masyarakat baik tatap muka langsung, full online maupun blended training sehingga pencapaian secara keseluruhan sebanyak 1.165 orang purnawidya sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Metode daring juga dibantu oleh para penyuluh dilapangan untuk mengawal dan membantu para peserta pelatihan dalam melakukan proses pelatihan baik dalam



mengakses E-Jaring sebagai media pembelajaran online maupun tatap muka secara daring dengan menggunakan aplikasi zoom.



Gambar 17. Kegiatan Pelatihan Budidaya Ikan Nila Di Kab. Sorong Prov. Papua barat



Gambar 18. Kegiatan Pelatihan Penanganan Ikan Diatas Kapal Di Kab. Pulau Morotai Prov. Maluku Utara



Gambar 19. Kegiatan Pelatihan Pengolahan Ikan Julung di Kab. Seram Bagian Timur Prov. Maluku



Gambar 20. Kegiatan Pelatihan Perawatan dan Pengoperasian Instalasi Penggerak Utama Kapal di Kota Kendari



Gambar 21. Kegiatan Pelatihan Daring Budidaya Rumput Laut



Gambar 22. Kegiatan Pelatihan Daring Pembuatan pancing tonda





Gambar 23. Kegiatan Pelatihan Daring Pembuatan Rawai Dasar



Gambar 24. Kegiatan Pelatihan Daring Budidaya Polikultur Lele dan Sayur

d) IKU 8 : Percontohan penyuluhan KP yang diterapkan di Satminkal BPPP Ambon (unit)

Merupakan indikator yang menunjukkan salah satu metode penyuluhan dalam bentuk percontohan penyuluhan KP di lokasi percontohan yang telah ditentukan. Penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan Identifikasi jumlah percontohan penyuluhan KP. IKU ini sudah ada pada tahun 2019 dengan pencapaian sebanyak 2 kelompok. IKU ini juga merupakan turunan dari IKU Seksi Penyuluhan. Sampai akhir Tahun 2020, BPPP ambon telah melakukan pendataan calon kelompok yang dijadikan percontohan penyuluhan KP sehingga nilai pencapaian pada Tahun 2020 adalah 1 Kelompok.



Gambar 25. Papan Nama Percontohan



Gambar 26. Kegiatan Buididaya Ikan kuwe Pada Percontohan



- e) IKU 9 : Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga diklat di BPPP Ambon (lembaga)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lembaga pelatihan dan penyuluhan yang terstandar. IKU ini merupakan IKU yang sudah ada sejak tahun 2018, realisasi pada tahun 2018 sebanyak 1 unit dan pada tahun 2019 sebanyak 1 unit.

IKU ini merupakan turunan dari IKU Subbag Tata Usaha. Sampai akhir Tahun 2020, BPPP ambon telah dilakukan survailance Lembaga diklat BST oleh Ditkapel Kementerian Perhubungan sehingga nilai pencapaian pada Tahun 2020 telah 1 lembaga.

- f) IKU 10 : Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Sektor KP yang dibina di BPPP Ambon (unit)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah usaha mikro kecil dan pendirian koperasi sektor KP yang dibina oleh penyuluh Satminkal BPPP Ambon. IKU ini merupakan IKU penyuluhan yang sudah ada sejak tahun 2018 pada saat penyuluh perikanan di daerah bergabung dengan pusat sehingga terbentuk Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) di BPPP Ambon pada tahun 2017, namun merupakan target antara Seksi Penyuluhan dengan penyuluh Satminkal dengan target sebanyak 70 % penyuluh yang melakukan legalisasi izin usaha mikro kecil dan pendirian koperasi sektor KP dedangkan pada tahun 2019 nilai pencapaian IKU ini sudah mencapai 647 unit.

IKU ini merupakan turunan dari IKU seksi Penyuluhan, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah usaha mikro kecil dan koperasi sektor KP yang dibina oleh penyuluh Satminkal BPPP Ambon yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan Satminkal BPPP Ambon. sampai akhir Tahun 2020 Penyuluh Satminkal BPPP ambon sudah melakukan pembinaan kepada Usaha Mikro Kecil sebanyak 548 unit dari target kelompok yang disuluh sebanyak 544



unit. Para penyuluh Satminkal BPPP Ambon juga telah dibekali juknis pembinaan usaha mikro kecil dan koperasi sehingga dapat dilakukan.



Gambar 27. Legalisasi usaha mikro kecil

4. Sasaran Strategis 4 (SS4) : Tatakelola pemerintahan yang baik.

Untuk mencapai sasaran strategis Tatakelola pemerintahan yang baik terdapat 4 Indikator Kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 11 : Indeks profesionalitas ASN lingkup BPPP Ambon, IKU 12 : Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Ambon (%), IKU 13 : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (nilai), IKU 14 : Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Ambon dibandingkan realisasi anggaran BPPP Ambon TA. 2019 (%) dan IKU 15 : Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (nilai).

a) IKU 11 : Indeks profesionalitas ASN lingkup BPPP Ambon.

Indeks profesionalitas ASN dimaksud terdiri dari Kehadiran Pegawai, Capaian Kinerja (SKP), LHKASN/LHKPN, terhadap Pejabat yang telah dilakukan Asesmen. IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar 81,51 % dan tahun 2018 sebesar 93,25% dan tahun 2019 sebesar 75,88%. Perhitungan ini juga dapat



dilihat melalui website <http://ropeg.kkp.go.id:4080/?#/ip-asn/eselon> dengan perhitungan nilai sebagai berikut :

= Indeks kualifikasi pendidikan ASN + Indeks disiplin ASN + Indeks kinerja ASN + Indeks kompetensi ASN

IKU ini merupakan turunan dari IKU Subbag Tata Usaha, sampai akhir Tahun 2020 BPPP ambon telah melakukan input data kepegawaian kedalam aplikasi epegawai masing-masing pegawai, sosialisasi tentang komponen yang harus diisi pada aplikasi e-pegawai yang akan terhubung dengan Ropeg KKP oleh setiap ASN BPPP Ambon dan diperoleh angka sebesar 76,28% yang dapat dilihat di ROPEG KKP.

b) IKU 12 : Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Ambon.

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Jumlah unit kerja yang tergabung dalam media yang *menshared* data sesuai dengan data yang di distribusikan dalam aplikasi *Btrix*. IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar 70,80 % dan tahun 2018 sebesar 95,23% dan tahun 2019 sebesar 100%.

IKU ini merupakan turunan dari IKU Seksi Program, Monitoring dan Evaluasi, sampai akhir Tahun 2020 BPPP Ambon memperoleh nilai hasil perhitungan IKU ini oleh PUSlat KP dan diperoleh nilai sebagai berikut :

= Pemenuhan Dokumen MP yang sudah diupload dalam aplikasi Btrix + Keikutsertaan MP dalam aplikasi Btrix + Keaktifan MP dalam aplikasi Btrix

= 20 + 40 + 40

= 100%



Perolehan nilai tersebut dikarenakan keaktifan para pejabat dalam menshare manajemen pengetahuan secara kontinyu pada aplikasi Bitrix KKP dan pemenuhan dokumen kinerja yang diupload pada aplikasi Bitrix KKP.

c) IKU 13 : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar 90,50%, tahun 2018 sebesar 86,83% dan pada tahun 2019 sebesar 95,39%

IKU ini merupakan turunan dari IKU Seksi Program, Monitoring dan Evaluasi, sampai akhir Tahun 2020, perolehan nilai ini berdasarkan perhitungan pada aplikasi OM SPAN BPPP Ambon dengan perolehan pada tahun 2020 sebesar 92,83%.

d) IKU 14 : Batas Tertinggi Temuan LHP BPK atas LK BPPP Ambon dibandingkan realisasi anggaran BPP Ambon TA. 2018

Merupakan indikator batas tertinggi presentase temuan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPPP Ambon dibandingkan realisasi tahun 2018.

IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2018, realisasi pada tahun 2018 sebesar 0 % dan pada tahun 2019 juga sebesar 0%.

IKU ini merupakan turunan dari IKU Subbag Tata Usaha, IKU ini merupakan hasil penilaian dari level atasannya yaitu dari BRSDM KP sehingga pencapaian IKU BPPP Ambon mengikuti hasil perhitungan pencapaian IKU BRSDM KP yaitu 0 %.



e) **IKU 15 : Nilai Kinerja Anggaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon**

Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar 90,50%, tahun 2018 sebesar 86,83% dan pada tahun 2019 sebesar 95,39%

IKU ini merupakan turunan dari IKU Seksi Program, Monitoring dan Evaluasi, sampai akhir Tahun 2020, perhitungan ini berdasarkan perhitungan pada aplikasi SMART DJA dan hasilnya sebesar 92,03%

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Penyerapan anggaran BPPP Ambon pada Tanggal 18 Desember 2020, dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3. Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 18 Desember 2020

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	45.873.585.000	42.285.405.916	3.588.179.084	92,18
Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih	1.350.765.000	1.187.945.790	162.819.210	87,95
Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP	4.763.776.000	4.471.865.504	291.910.496	93,87
Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan	86.000.000	86.000.000	-	100,00



Layanan Dukungan Manajemen Satker	356.639.000	310.972.349	45.666.651	87,20
Layanan Perencanaan dan Evaluasi Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	71.000.000	68.364.113	2.635.887	96,29
Layanan Ketatausahaan	285.639.000	242.608.236	43.030.764	84,94
Layanan Perkantoran	39.316.405.000	36.228.622.273	3.087.782.727	92,15
Gaji dan Tunjangan	37.378.798.000	34.402.744.722	2.976.053.278	92,04
Operasional dan Pemeliharaan Kantoran	1.937.607.000	1.825.877.551	111.729.449	94,23

Dalam perjalanannya terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

1. Belum terealisasinya anggaran Tunjangan Kinerja Penyuluh Satminkal BPPP Ambon secara penuh setiap bulannya dikarenakan kurang tertibnya penyuluh dalam menyampaikan data dukung pembayaran tunjakin berupa presensi dan capaian kinerja
2. Belum terealisasinya anggaran Biaya Operasional Penyuluh (BOP) PNS dan Penyuluh Perikanan Bantu Satminkal BPPP Ambon secara penuh setiap bulannya dikarenakan kurang tertibnya penyuluh dalam menyampaikan data dukung pembayaran BOP.

Secara umum kinerja BPPP Ambon tahun 2020 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasil tercapai secara optimal. Namun demikian secara teknis masih tetap perlu dilakukan optimasi pelaksanaan kegiatan seperti:



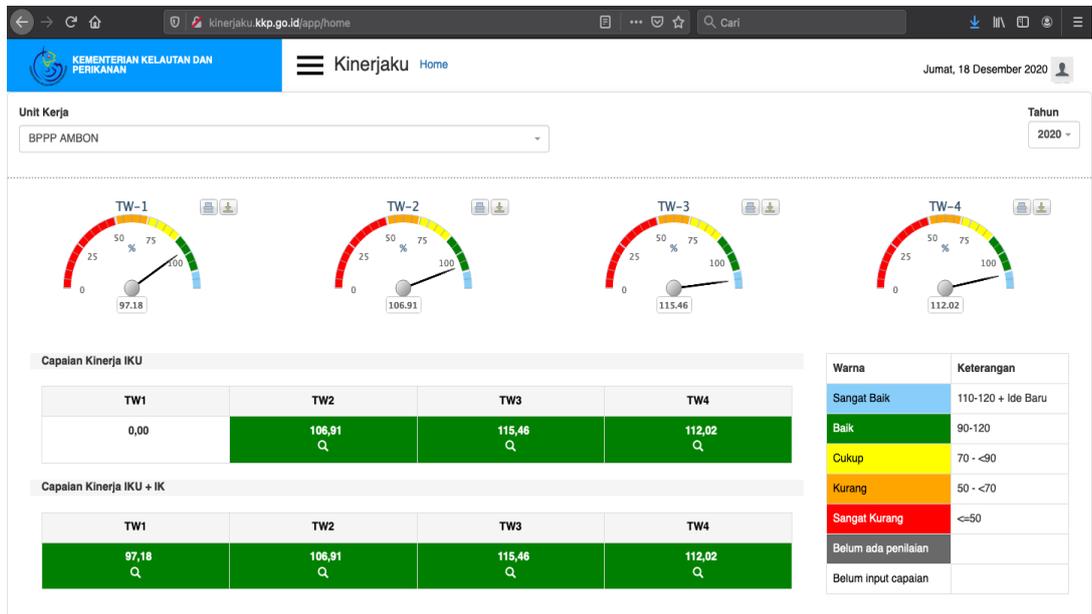
1. Sosialisasi kepada penyuluh Satminkal BPPP Ambon tentang mekanisme pembayaran Tunjangan Kinerja sehingga anggaran Tunjangan Kinerja Penyuluh dapat dibayarkan penuh setiap bulannya.
2. Sosialisasi kepada penyuluh PNS dan PPB Satminkal BPPP Ambon tentang mekanisme pembayaran BOP sehingga anggaran BOP Penyuluh PNS dan PPB dapat dibayarkan penuh setiap bulannya.



BAB IV. PENUTUP

4.1 Capaian Kinerja Utama

Pada tahun 2020, BRSDM memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 6 Sasaran Strategis dan 18 Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian kinerja BPPP Ambon tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indikator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPP Ambon di tingkat korporat tahun 2020 sebesar 112,02%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 28. Dashboard Kinerjaku Level 3 BPPP Ambon

Selama tahun 2020, dari 15 IKU BPPP Ambon, seluruh IKU telah berwarna hijau. Itu artinya seluruh target yang telah ditetapkan telah tercapai semua. Rincian target dan realiasi dari 11 IKU tersebut adalah:



- 1) Kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon (kelompok), sampai akhir Tahun 2020 Penyuluh Satminkal BPPP ambon sudah melakukan penyuluhan sebanyak 2.583 kelompok dari target kelompok yang disuluh sebanyak 2.518 kelompok.
- 2) IKU 2 : Kelompok yang dinilai kelas kelompoknya di Satminkal BPPP Ambon (kelompok), sampai akhir Tahun 2020, Penyuluh Satminkal BPPP ambon telah melakukan pendataan calon kelompok yang akan dinilai kelas kelompoknya sebanyak 234 kelompok.
- 3) IKU 3 : Calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan di Satminkal BPPP Ambon (kelompok), sampai akhir Tahun 2020, Penyuluh Satminkal BPPP ambon sudah melakukan penumbuhan kelompok baru sebanyak 48 kelompok dari target kelompok yang ditumbuhkan sebanyak 97 kelompok.
- 4) IKU 4 : Desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP di BPPP Ambon (desa), sampai akhir Tahun 2020, Penyuluh Satminkal BPPP ambon telah melakukan kerjasama dengan 2 desa yang menerapkan IPTEK KP sehingga nilai pencapaian pada Triwulan III Tahun 2020 sebanyak 2 Desa.
- 5) IKU 5 : Lulusan pelatihan yang bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%), sampai akhir Tahun 2020, BPPP ambon telah melakukan pendataan lulusan pelaku utama/usaha yang akan menerapkan hasil pelatihannya sebanyak 510 orang atau 43,77 %
- 6) IKU 6 : Lulusan pelatihan yang membentuk rintisan usaha baru di BPPP Ambon (orang), sampai akhir Tahun 2020, BPPP ambon telah melakukan pendataan pelaku utama lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dan memanfaatkan teknologi digital dan atau jejaring pasar dalam pengembangan usahanya sebanyak 3 orang dari target senyak 5 orang, sehingga nilai pencapaian pada Tahun 2020 masih 3 orang.
- 7) IKU 7 : SDM KP yang dilatih di BPPP Ambon (orang), Sampai akhir Tahun 2020 sudah dilakukan pelatihan masyarakat baik tatap muka



langsung, full online maupun blended training sehingga pencapaian secara keseluruhan sebanyak 746 orang purnawidya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat data dukung capaian IKU kinerja tahun 2020.

- 8) IKU 8 : Percontohan penyuluhan KP yang diterapkan di Satminkal BPPP Ambon (unit), Sampai akhir Tahun 2020, BPPP ambon telah melakukan pendataan calon kelompok yang dijadikan percontohan penyuluhan KP sehingga nilai pencapaian pada Tahun 2020 adalah 1 Kelompok.
- 9) IKU 10 : Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Sektor KP yang dibina di BPPP Ambon (unit), sampai akhir Tahun 2020 Penyuluh Satminkal BPPP ambon sudah melakukan pembinaan kepada Usaha Mikro Kecil sebanyak 200 unit dari target kelompok yang disuluh sebanyak 544 unit.
- 10) IKU 12 : Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Ambon, sampai akhir Tahun 2020 BPPP Ambon memperoleh nilai hasil perhitungan IKU ini oleh PUSlat KP dan diperoleh nilai 100%.
- 11) IKU 13 : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, sampai akhir Tahun 2020, perolehan nilai ini berdasarkan perhitungan pada aplikasi OM SPAN BPPP Ambon dengan perolehan pada sebesar 93,86%.

4.2 Permasalahan dan Rekomendasi

1. Capaian IKU SDM KP yang dilatih dikhawatirkan tidak akan mencapai target terkendala pelaksanaan pelatihan masyarakat KP berdasarkan aspirasi, hal ini disebabkan koordinasi dengan tenaga ahli anggota Komisi IV DPR RI masih mengalami kendala dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan pelatihan harus disesuaikan dengan jadwal masa reses anggota Komisi IV DPR RI serta sebagian masyarakat KP masih belum terbiasa dengan aplikasi E-Jaring sebagai media pembelajaran online dan aplikasi tatap muka secara virtual sebagai sarana utama pembelajaran metode daring selama masa pandemi COVID-19 sehingga perlu berkoordinasi secara intensif



dengan tenaga ahli tentang kepastian jadwal masa reses anggota Komisi IV DPR RI dan Penyuluh Setempat melakukan pendampingan secara intensif kepada calon peserta pelatihan dan membimbing tata cara penggunaan aplikasi E-Jaring dan aplikasi tatap muka secara virtual.

2. IKU dengan Target Kinerja Tahunan

Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IKU agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BPPP Ambon. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BPPP Ambon. Akhirnya, BPPP Ambon berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 **BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Abubakar**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua

Kepala Pusat Pelatihan dan
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon

Abubakar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	1	Kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon (kelompok)	2.518
		2	Kelompok yang dinilai kelas kelompoknya di Satminkal BPPP Ambon (kelompok)	39
		3	Calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan di Satminkal BPPP Ambon (kelompok)	97
2	Pelatihan dan penyuluhan mendukung hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan	4	Desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP di BPPP Ambon (desa)	1
3	Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat	5	Persentase lulusan pelatihan yang bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)	60
		6	Lulusan pelatihan yang membentuk rintisan usaha baru di BPPP Ambon (orang)	5
		7	SDM KP yang dilatih di BPPP Ambon (orang)	1.165
		8	Percontohan penyuluhan KP yang diterapkan di Satminkal BPPP Ambon (unit)	1
		9	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga diklat di BPPP Ambon (lembaga)	1
		10	Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Sektor KP yang dibina di BPPP Ambon (unit)	544
		11	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPP Ambon (indeks)	72
4	Tatakelola pemerintahan yang baik	12	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Ambon (%)	82
		13	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (nilai)	Baik (88)

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		14	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Ambon dibandingkan realisasi anggaran BPPP Ambon TA. 2019 (%)	1
		15	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	85

Kegiatan : Pelatihan dan Penyuluhan KP
 Jumlah Anggaran Tahun 2020 : Rp 47.873.585.000,-

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua

Kepala Pusat Pelatihan dan
 Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan
 Penyuluhan Perikanan Ambon

Abubakar



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON
JALAN MARTHA ALFONS, POKA KODE POS 97233 TELUK AMBON
TELEPON (0911) 322710, FAKSIMILE (0911) 322711
Website : bp3ambon-kkp.org
Email : BPPP_ambon@kkp.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BPPP AMBON
NOMOR : KEP.1546/BPPP/KP.110/X/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2019
DAN TRIWULAN TAHUN 2020 BPPP AMBON**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi pelaksanaan anggaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon Tahun 2020 dipandang perlu menunjuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 dan Triwulan Tahun 2020.
 2. Bahwa Pegawai yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pada BPPP Ambon.
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 27/PERMEN-KP/2017 tanggal 27Maret 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.
 2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 06/MEN-SJ/KP.430/IX/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.41/MEN/KU.611/2020 Tanggal 30 September 2020 Tentang Perubahan Keduables atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2020.
- Memperhatikan** : Surat Pengesahan DIPA Nomor : SP DIPA-032.12.2.238755/2020 tanggal 12 November 2019.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat mereka yang nama-nama dan jabatannya tersebut dalam kolom 2 dan 3 pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pada BPPP Ambon.
- Kedua** : Biaya untuk keperluan Laporan Kinerja (LKj) dibebankan pada DIPA Nomor : SP DIPA-032.12.2.238755/2020 tanggal 12 November 2019 BPPP Ambon T.A. 2020.
- Ketiga** : Kepada mereka yang nama-nama dan jabatannya tersebut pada amar pertama, dalam melaksanakan tugasnya masing-masing bertanggung jawab kepada Kepala BPPP Ambon.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mencabut Surat Keputusan sebelumnya dengan Nomor : KEP.21/BPPP/KP.110/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diatur dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 01 Oktober
2020

Kepala Balai Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran,

Abubakar, S.St.Pi, M.Si
NIP. 19780427 200312 1 001

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia
UP. – DIRJEN Anggaran di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta.
4. Sekretaris Badan Riset SDMP-KP di Jakarta.
5. Kapus Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Jakarta
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta.
7. Kepala Kantor Wilayah XXIX Dirjen Anggaran Ambon di Ambon.
8. KPPN Ambon di Ambon.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Selaku Kuasa Pengguna
 Anggaran BPPP Ambon
 Nomor : KEP.1546/BPPP/KP.110/X/2020
 Tanggal : 01 Oktober

**Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
BPPP Ambon T.A. 2020**

No.	Nama	Jabatan	Uraian Tugas / Keterangan
1	2	3	4
1.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	Penanggungjawab Pengumpulan Data / Ketua	merencanakan, menyusun, m emeriksa LKj dan mengkoordinir pengumpulan data dukung dari Seksi Program Dan Monev
2.	Pirhel, S.Sos, M.Si	Penanggungjawab Pengumpulan Data	Mengkoordinir pengumpulan data dukung dari subbagian Tata Usaha
3.	Ekadasa Priantara, ST, M.Si	Penanggungjawab Pengumpulan Data	Mengkoordinir pengumpulan data dukung dari Seksi Pelatihan
4.	A.R. Sopaheluwakan, S.Pi, M.Si	Penanggungjawab Pengumpulan Data	Mengkoordinir pengumpulan data dukung dari Seksi Penyuluhan
6.	Moh. Arief Hidayat, A.Md	Sekretaris	menyusun laporan kinerja (LKj)
7.	Fiona A.B. Nikyuluw, S.Pi, M.Si	Anggota	membantu menyusun laporan kinerja (LKj)
8.	Dessy Rompis	Anggota	membantu menyusun laporan kinerja (LKj)
9.	Wahyu Retno Aris, S.St.Pi	Anggota	membantu menyusun laporan kinerja (LKj)



Kepala Balai Selaku
 Kuasa Pengguna Anggaran

Abubakar, S.St.Pi, M.Si
 NIP. 19780427 200312 1 001